IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA PERMISAN KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO

Dicky Julian Tri P

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (dickyjulianTP@gmail.com)

Indah Prabawati, S.Sos, M.Si.

Abstrak

Program Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan, dengan memberi pelatihan, pendampingan dan bantuan modal. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, Badan Ketahanan Pangan membuat Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) bagi masyarakat yang ada di desa. Adanya program Demapan di Desa Permisan adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Dan hanya di Desa Permisan yang masih memasuki tahap pengembangan

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Kasubid Distribusi Pangan di Bidang Pengadaan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo, Punyuluh Pendamping Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan warga sekitar. Khususnya Desa Permisan yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program Demapan dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III. Badan Ketahanan Pangan dalam menyampaikan isi dan tujuan dari program Demapan ini melalui sosialisasi dan penyuluhan secara langsung di Desa Permisan. Sumberdaya dalam pelaksanaan Program Demapan di Desa Permisan secara kualitas pelaksana program sudah memadai, tetapi untuk sumber daya manusia di Desa Permisan masih kurang memadai. Dalam penempatan pelaksana program, seperti petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Struktur birokrasi merupakan kerja sama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Demapan, seperti petugas lapangan, kepala bidang dan staf. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala pada penelitian ini adalah masih kurang memadai Sumberdaya yang ada di Desa Permisan baik manusia dan infrastruktur, serta masih belum adanya mitra dalam pengembangan usaha yang ada di desa tersebut. Seharusnya Badan Ketahanan Pangan lebih aktif dalam pemberian pelatihan ketrampilan agar masyarakat Desa Permisan memiliki keahlian dan menyediakan mitra agar produk dari desa mampu berkembang lebih maju.

Kata Kunci : implementasi program, Program Desa Mandiri Pangan

Abstract

Village independent food program is a program that people have the ability to achieve food security and nutrition independently, by utilizing local resources sustainably, to provide training, mentoring and capital assistance. Under Law No. 18 Year 2012 on food, the Food Security to make the Village Independent Food Program (Demapan) for the people in the village. The existence of the village Permisan Demapan program is to enhance the empowerment of poor rural communities in managing and utilizing resources owned or controlled optimally, in achieving food self-sufficiency of households and communities. Of the four villages get Demapan program, only in the village Permisan still entered the development stage.

The method used is descriptive with qualitative approach. The sources of this study is the Head of Food Distribution in the Field of Food Procurement Food Security Agency Sidoarjo regency, instructor Companion Village Permisian Jabon subdistrict of Sidoarjo regency and nearby residents. Especially Permisian village which is the goal of this study. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis was performed with data collection, data presentation and conclusion.

Results from this study explained that the implementation of the program by using the model implementation Demapan George C. Edward III. Food Security Agency in delivering the content and purpose of this Demapan program through socialization and counseling directly in the village Permisian. Resources in the implementation of the program in the village Demapan Permisian in implementing quality programs are adequate, but for human resources in the village Permisian still inadequate. In implementing placement programs, such as field officers and field supervisors are in accordance with the field and their expertise. The bureaucratic structure is a collaboration between the parties involved in the implementation of the program. Demapan, such as field officers, and the chief of staff. But in fact the are still obstacles in this study is still insufficient resources in the village Permisian both human and infrastructure. And yet the partners in the development of businesses in the village. Food Security Agency should have been more active in the provision of skills training so that villagers Permisian expertise and partners in order to provide products of the village is able to develop more advanced.

Keywords : implementation, Village Independent Food Program

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemandirian Pangan adalah intinya pemenuhan kebutuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efektif dan efisien (Sumber: Permentan No 15 Tahun 2015 Pedoman Desa Mandiri Pangan).

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan, menetapkan bahwa kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan pedesaan bertujuan mewujudkan ketahanan pangan dalam satu wilayah dengan keterpaduan sarana dan prasarana dalam aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Selain itu membangun daerah pedesaan sangat penting terutama dalam hal penyediaan bahan baku pangan untuk penduduk, penyediaan tenaga kerja untuk pembangunan, penyediaan bahan baku untuk industri,

dan penghasil komoditi untuk bahan pangan dan ekspor. Jadi, desa merupakan salah satu *entry point* untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Salah satu upaya pemerintah Sidoarjo melalui Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2013 Desa Mandiri Pangan Kabupaten Sidoarjo yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan kemiskinan di pedesaan adalah melalui Program Desa Mandiri Pangan (Demapan). Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian.

Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan 4 (empat) tahap berturut-turut melalui 4 tahapan pelaksanaan yaitu: tahap persiapan, penumbuhan,

pengembangan dan kemandirian. Tiap tahapan memuat berbagai macam kegiatan dengan waktu pelaksanaan tiap tahapan selama satu tahun. Kegiatan difokuskan di daerah rawan pangan dengan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang telah ada di tingkat desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping di setiap desa pelaksana selama empat tahun berturut-turut mulai dari tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian (Sumber: Petunjuk Teknis Desa Mandiri Pangan Tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo).

Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin >30% (tiga puluh persen) sehingga risiko rawan pangan dan gizi buruk yang tersebar di seluruh provinsi dapat teridentifikasi. Melalui program Desa Mandiri Pangan, diharapkan masyarakat desa mampu memproduksi dan memenuhi produk-produk pangan yang dibutuhkan dengan didukung unsur-unsur sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, sarana dan prasarana, sehingga dapat mengurangi risiko kerawanan pangan dan dapat menciptakan ketahanan pangan di dalam lingkup desa. Adapun tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Sasaran kegiatan Demapan adalah Rumah Tangga Miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat.

Sumber pendanaan untuk membiayai Desa Mandiri Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat yang disalurkan oleh instansi terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing (Sumber: Permentan No 15 Tahun 2015 Pedoman Desa Mandiri Pangan). Salah satu komponen kegiatan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan adalah penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk pengembangan usaha produktif di Desa Permisian, meliputi perdagangan, pertanian, perikanan dan pengolahan pangan. Dana bansos tersebut diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan yang akan dilimpahkan kepada Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang ada di setiap desa. Dana tersebut dikelola oleh Lembaga Keuangan tingkat kawasan yang ditumbuhkan dari dan oleh masyarakat desa. Desa Mandiri Pangan

mempunyai definisi desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan (Sumber: Permentan No 15 Tahun 2015 Pedoman Desa Mandiri Pangan).

Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) diterapkan di Sidoarjo pada tahun 2010 yang awalnya hanya 2 desa, yaitu Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo dan Desa Wonomlati Kecamatan Krembung, kemudian pada tahun 2012 ditambahkan 2 desa, yaitu Desa Gampang Kecamatan Prambon dan Desa Permisian Kecamatan Jabon, jadi saat ini program Desa Mandiri Pangan diterapkan di empat desa yaitu Desa Wonomlati Kecamatan Krembung, Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo, Desa Gampang Kecamatan Prambon dan Desa Permisian Kecamatan Jabon. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam program Desa Mandiri Pangan, dirancang dalam empat tahap yaitu persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Dari keempat desa tersebut hanya Desa Permisian yang memasuki tahapan pengembangan dan tiga desa yang lainnya sudah pada tahap kemandirian.

Bentuk program Desa Mandiri Pangan adalah sosialisasi isi dan tujuan program kepada masyarakat desa, pemberian pelatihan pembinaan, pemberian dana bantuan sosial dan monitoring yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan. Program Desa Mandiri Pangan terdiri dari Lembaga Keuangan Desa (LKD) yaitu lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok, yang beranggotakan sub-sub kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif desa, Tim Pangan Desa (TPD) yaitu lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari perwakilan aparat, tokoh desa perwakilan rumah tangga miskin yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan pedesaan, dan kelompok afinitas yaitu kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat. Dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menemui berbagai masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi adalah dukungan dari wilayah baik desa maupun kecamatan masih belum optimal, belum ada mitra untuk pengembangan usaha yang ada di desa, bantuan alat untuk kelompok afinitas yang tidak menjangkau keseluruhan dan Sumber Daya Manusia di desa yang kurang memadai (Sumber: Laporan Tahunan Demapan Badan Ketahanan Pangan

dan Pelaksanaan Penyuluhan 2014 Kabupaten Sidoarjo).

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana implementasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisan dengan Judul "Implementasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo". Merujuk pada uraian latar belakang yang telah peneliti sampaikan di atas, maka peneliti membuat sebuah rumusan masalah untuk mempersempit ruang lingkup masalah yang akan dikaji sehingga penelitian ini bisa fokus pada satu masalah yang dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah Bagaimana implementasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Dalam penelitian Implementasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan bentuk nyata dari keadaan yang diteliti dengan bentuk tulis, kata, gambar dan kalimat. Menurut Sugiyono (2008:11) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis bersifat induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan deskriptif kualitatif didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini bersifat mendeskripsikan fenomena apa adanya secara urut dan sistematis (Sugiyono, 2014:5).

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini berfokus pada Implementasi dalam program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan mengambil teori George C Edward (dalam Agustino, 2008: 149-154) yang terdiri dari 4 indikator antara lain *Communication* meliputi *Transmission* yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*), *Clarity* yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-*

bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, *Consistency* yaitu perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. *Resources* meliputi *Staff* yaitu sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya, *Information* yaitu dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, *Authority* yaitu Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, *Facilities* yaitu Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. *Disposition* meliputi *Appointment of bureaucrat* yaitu disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, *Incentives* yaitu pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka pemberian insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. *Bureaucratic Structure* meliputi *Standar Operating Procedures (SOPs)* yaitu suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan, *Fragmentasi* yaitu upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantar beberapa unit kerja.

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwa hanya desa Permisan yang masih dalam

tahap pengembangan dan juga ingin mengetahui permasalahan yang menghambat program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Untuk subyek penelitian ini adalah Bapak Andy Inawan B selaku Kasubid Distribusi Pangan di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo terkait yang menangani program Desa Mandiri Pangan, Bapak Abdul Muntholib selaku Penyuluh Pendamping Desa permisan dan Bapak Asep Nugroho, Ibu Wahyuni Ningsih, Bapak Budi Hendarto dan Sri Puji Astuti selaku masyarakat Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak yang melaksanakan program Desa Mandiri Pangan. Jenis data oleh peneliti adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif tidak dalam bentuk angka melainkan berupa kata, kalimat, gambar, video, rekaman suara dan sebagainya. Serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu primer dan sekunder.

Peneliti dalam observasi dan wawancara di lapangan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, alat tulis, kamera (dokumentasi), perekam suara dan media Internet. Dan beberapa cara teknik pengumpulan data yang dapat peneliti lakukan dengan penunjang instrumen penelitian adalah melalui observasi yaitu melakukan pengamatan langsung tentang keadaan di lapangan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analisis yang dikembangkan Milles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2014:338) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Desa Mandiri Pangan merupakan program yang di buat oleh Menteri Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan, agar masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal. Program tersebut memberi pelatihan berupa komputerisasi, ketrampilan untuk membuat suatu produk yang diberikan oleh pemateri dari Badan Ketahanan Pangan, selain itu juga mengadakan workshop dengan mengundang narasumber yang sudah sukses di bidangnya agar masyarakat terpacu untuk berwirausaha dan pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang akan dikelola oleh penyuluh pendamping agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, menetapkan bahwa kondisi terpenuhinya pangan bagi

negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif berkelanjutan.

Pada program Desa Mandiri Pangan membentuk beberapa lembaga seperti LKD (Lembaga Keuangan Desa) yang merupakan lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok, yang beranggotakan sub-sub kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif pedesaan, TPD merupakan lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari perwakilan aparat desa, tokoh masyarakat, perwakilan rumah tangga miskin, yang memiliki fungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di pedesaan dan kelompok afinitas yang merupakan kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi (Permentan No 15 Tahun 2015 Pedoman Desa Mandiri Pangan).

Kabupaten Sidoarjo memilih empat desa untuk program Desa Mandiri Pangan (Demapan) yaitu Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo, Desa Wonomlati Kecamatan Krembung, Desa Gampang Kecamatan Prambon dan Desa Permisian Kecamatan Jabon. Kabupaten Sidoarjo memilih empat desa untuk program Desa Mandiri Pangan (Demapan) yaitu Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo, Desa Wonomlati Kecamatan Krembung, Desa Gampang Kecamatan Prambon dan Desa Permisian Kecamatan Jabon. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Andy Inawan B selaku Kasubid Distribusi Pangan di Bidang Pengadaan Pangan Kabupaten Sidoarjo mengenai program Desa Mandiri Pangan antara lain:

“... ya kalau di Sidoarjo sementara baru empat desa yang mendapatkan program Desa Mandiri Pangan (Demapan) yaitu Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo, Desa Wonomlati Kecamatan Krembung, Desa Gampang Kecamatan Prambon dan Desa Permisian Kecamatan Jabon, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun berikutnya kita menambah desa lagi agar masyarakat Sidoarjo itu mampu mandiri secara pangan. (wawancara tanggal 3 Agustus 2015)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa program Desa Mandiri Pangan baru 4 desa yang mendapatkan salah satunya adalah Desa Permisian.

Desa Permisian adalah satu wilayah terkecil yang terletak di selatan timur 15 km dari Kota Kabupaten Sidoarjo, luas wilayah 852.498 km² dan jumlah penduduk 1446 jiwa, serta jumlah Kepala Keluarga

adalah 444 KK dan yang tergolong Rumah Tangga Miskin 139 KK. Masyarakat di Desa Permisian 85% menggantungkan dari kerja buruh (buruh tani, buruh tambak dan buruh pabrik). Program Desa Mandiri Pangan diterapkan di Desa Permisian pada tahun 2012 hingga sekarang.

Dari keempat desa, hanya di Desa Permisian yang masih memasuki tahap pengembangan, maka peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk mempersempit deskripsi tentang Program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo peneliti menggunakan teori dari George C. Edward (dalam Agustino Leo, 2008: 149-154) tentang Model Implementasi *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang terbagi dari empat indikator yaitu *Communication* meliputi *Transmission*, *Clarity* dan *Consistency*. *Resources* meliputi *Staff*, *Information*, *Authority* dan *Facilities*. *Disposition* meliputi *Appoinment of Bureaucrats* dan *Incentives*. *Bureaucratic Structure* meliputi *Standar Operating Procedures (SOPs)* dan *Fragmentation* dan yang akan menjadi fokus penelitian antara lain: pertama *Communicattoion* meliputi *Transmission* yaitu dimensi transmisi berkehendak dalam proses penyampaian informasi tidak hanya kepada pelaksana program melainkan harus melibatkan target sasaran juga agar implementasi dari suatu program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Bentuk komunikasi yang dilakukan BKP berupa rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala BKP yang diikuti oleh semua pegawai guna membahas dan mengevaluasi program yang ada. Kemudian untuk komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat desa berupa sosialisasi program yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan dibantu oleh penyuluh pendamping, namun dukungan dari masyarakat Desa Permisian masih kurang berperan aktif dikarenakan mereka lebih suka untuk kerja dipabrik dibandingkan untuk mengikuti program pemerintah. *Clarity* yaitu Dimensi kejelasan menghendaki komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan *target group* dalam hal ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM). pelaksana program dan *target group* sudah jelas dan paham dengan tujuan dan isi dari Desa Mandiri Pangan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan RTM selaku *target group* yang sudah mengerti program tersebut melalui sosialisasi dan penyuluh pendamping desa, tetapi masih ada

sedikit kendala yang membuat masyarakat Desa Permisian merasa kebingungan kepada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo yaitu memberikan bantuan dana terlebih dahulu yang seharusnya pemberian pelatihan terlebih dahulu agar masyarakat memiliki bekal dalam berwirausaha. *Consistency* yaitu Dimensi konsistensi berkehendak agar implementasi harus konsisten, jelas dan bersih sehingga program atau kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. terkait konsistensi di Badan Ketahanan pangan dan Desa permisian masih menyesuaikan petunjuk teknis. Adanya pembaharuan petunjuk teknis guna untuk memperbaiki pelaksanaan program agar menjadi lebih baik dan intensitas pembaharuan itu jarang dilakukan, jadi dalam penyampaian informasi di BKP dapat dikatakan konsisten.

Kedua, *Resources* meliputi *Staff* yaitu dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program atau kebijakan dengan baik. yang bertugas melaksanakan program Desa Mandiri Pangan ialah pelaksana kegiatan hanya dibawah naungan bidang Pengadaaan Pangan yang memberi mandat kepada bagian bidang Distribusi Pangan. Kemudian untuk sumber daya manusia di Desa Permisian masih kurang memadai, dapat dilihat dari kemampuan masyarakat Desa Permisian yang masih rendah. Jadi ketika diberi pelatihan oleh Badan Ketahanan Pangan masyarakat Desa Permisian mengalami kesulitan untuk memahami materi yang diberikan, sehingga menghambat implementasi program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Information* yaitu Sumber daya informasi memiliki peran penting dalam implementasi suatu kebijakan atau program. Ketersediaan informasi yang cukup bagi para implementor sangat mendukung dalam pelaksanaan program atau kebijakan.

Terkait ketersediaan informasi di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa sudah baik dan jelas dengan adanya tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bagian. Selain itu Badan Ketahanan Pangan tetap melakukan monitoring ke tiap desa-desa, agar pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan dapat berjalan dengan baik dan tujuua dari program dapat tercapai. Selanjutnya, Ketersediaan informasi di Desa Permisian sudah jelas, dengan dibentuknya tim koordinasi oleh Badan Ketahanan Pangan yaitu penyuluh pendamping yang mempunyai tugas untuk menghubungkan Badan Ketahanan Pangan dengan masyarakat Desa Permisian dan juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisian. *Authority* yaitu Wewenang akan

menjadi efektif apabila pejabat yang bersangkutan tidak hanya mengintrepetasikan wewenang sebagai kekuasaan atau kekuatan semata namun juga peran, dimana peran setiap pejabat dalam berbagai divisi atau jenjang saling melengkapi dan berkoordinasi. mengenai kewenangan di BKP menunjukkan bahwa kewenangan sudah dimiliki oleh staf Badan Ketahanan Pangan untuk melaksanakan program Desa Mandiri Pangan melalui tupoksi dan Petunjuk Teknis yang ada. Badan Ketahanan Pangan juga membentuk Penyuluh Pendamping yang ditempatkan di setiap desa dan kemudian memberi wewenang kepada penyuluh pendamping untuk melaksanakan program Desa Mandiri Pangan ke setiap desa masing-masing. *Facilities* yaitu Salah satu fasilitas pendukung adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kebijakan, karena tanpa adanya fasilitas dalam pelaksanaan suatu program, maka akan menghambat jalannya implementasi program atau kebijakan. Sarana dan prasarana yang ada di desa Permisian masih belum memadai, seperti balai pertemuan yang masih belum ada, apabila Badan Ketahanan Pangan mengadakan pelatihan dan penyuluhan terkadang menggunakan rumah warga maupun Balai Desa itupun sangat kecil dan sempit. Badan Ketahanan Pangan memberi bantuan alat kepada masyarakat Desa Permisian di kala sarana dan prasarana yang kurang memadai, agar pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan tetap berjalan dengan baik. Namun, dalam pemberian bantuan alat oleh Badan Ketahanan Pangan kurang merata hanya sebagian warga yang mendapat bantuan alat, itu yang membuat pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan menjadi tidak efektif.

Ketiga, *Disposition* meliputi *Appointment of Bureaucrats* yaitu Dalam pemilihan dan pengangkatan birokrat pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dan dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan atau dibuat, agar program atau kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dalam pemilihan dan pengangkatan pelaksana program sudah tepat karena sebelum dipilih mereka terlebih dahulu diberi pelatihan-pelatihan agar memiliki kemampuan yang lebih, sehingga pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan dapat berjalan secara efektif dan efisien. *Incentives* Salah satu cara untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana program atau kebijakan adalah dengan pemberian insentif. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemberian insentif kepada pelaksanaan program masih belum ada, tetapi terkadang pihak Badan Ketahanan Pangan memberi insentif kepada pelaksana program seperti penyuluh pendamping intensitas waktunya dapat dikatakan jarang.

Keempat, *Bureaucratic Structure* meliputi *Standar Operating Procedure (SOPs)* yaitu adanya SOP memudahkan para pelaksana untuk menjalankan program atau kebijakan agar menjadi lebih efektif dan efisien. SOP program Desa Mandiri Pangan masih tahap penggodokan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo, agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik lagi. *Fragmentation* yaitu dibutuhkan adanya koordinasi yang baik antara pelaksana program dengan beberapa unit kerja. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa seluruh tanggung jawab dan yang menangani program Desa Mandiri Pangan adalah Bidang Pengadaan Pangan dan berkoordinasi dengan penyuluh pendamping yang ada di desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo masih mengalami banyak permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan. Sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Ketahanan Pangan dalam menyampaikan isi dan tujuan dari Program Desa Mandiri Pangan ini lewat sosialisasi dan penyuluhan secara langsung di Desa Permisian. Selain itu BKP juga dibantu oleh penyuluh pendamping untuk memberi informasi tentang Desa Mandiri Pangan di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Mengenai kejelasan informasi tentang program Desa Mandiri Pangan sudah jelas dan dapat diterima oleh masyarakat Desa permisian, namun masih ada kendala dalam penyampaian program yaitu dukungan dari masyarakat desa yang masih kurang terhadap program tersebut dan yang seharusnya pemberian pelatihan terlebih dahulu kemudian pemberian dana bantuan sosial itu terbalik menjadi pemberian dana terlebih dahulu yang membuat masyarakat desa permisian

- menjadi bingung dan hanya memiliki modal tetapi tidak memiliki bekal ketrampilan.
2. Sumberdaya dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon secara kualitas pelaksana kegiatan sudah memadai, tetapi untuk sumber daya manusia di desa Permisan masih kurang memadai. Namun, sarana dan prasarana di Desa Permisan masih kurang dikarenakan dana yang diberikan untuk membangun sarana masih belum cair, tetapi pihak BKP sudah memberi dana untuk membantu masyarakat Desa Permisan membuat usaha dan juga memberi bantuan alat. Dalam pemberian bantuan alat, BKP masih kurang merata atau mencakup keseluruhan masyarakat sehingga menghambat jalannya program tersebut. Selain itu, mitra untuk pengembangan usaha masyarakat desa permisan sampai saat ini masih belum ada.
 3. Dalam penempatan pelaksana kegiatan, seperti petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing dikarenakan sebelum melaksanakan program, mereka terlebih dahulu diberi pelatihan-pelatihan agar dapat melaksanakan program Desa Mandiri Pangan dengan efektif dan efisien.
 4. Struktur birokrasi merupakan bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan, seperti petugas lapangan, kepala bidang dan staf yang membantu sosialisasi program sudah berjalan dengan baik berdasarkan standar baku yang digunakan yaitu petunjuk teknis yang ada di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo. Tetapi mengenai SOP program Desa Mandiri Pangan masih dalam tahap penggodokan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo agar menjadi lebih baik lagi.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, peneliti memiliki beberapa saran agar program Desa Mandiri Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon dapat berjalan dengan baik. Saran tersebut antara lain:

1. Pada faktor komunikasi dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan di desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam dimensi transmisi yang menghendaki adanya komunikasi antara pelaksana program dengan *target group*. Transmisi program Desa Mandiri Pangan masih belum berjalan dengan baik dikarenakan dukungan dari masyarakat Desa Permisan masih kurang aktif, sehingga menghambat jalannya program tersebut. Mengingat persoalan tersebut, seharusnya BKP dan penyuluh pendamping lebih aktif dalam mensosialisasikan dan mengajak masyarakat desa, agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan baik.
2. Pada faktor sumberdaya terkait ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia di Desa Permisan masih kurang memadai, sehingga diperlukan adanya pembangunan sarana dan prasarana di Desa Permisan dan juga pemberian pelatihan-pelatihan rutin agar masyarakat memiliki ketrampilan yang lebih dan menunjang untuk berwiraswasta. Selain itu, dalam pemberian bantuan alat seharusnya Badan Ketahanan Pangan lebih merata mencakup keseluruhan agar warga dapat menjalankan usahanya dengan efektif dan Badan Ketahanan Pangan juga harus menyiapkan mitra usaha agar produk dari desa itu dapat berkembang lebih baik lagi.
3. Pada faktor disposisi di Badan Ketahanan Pangan mengenai program Desa Mandiri Pangan sudah berjalan dengan baik, tetapi harus lebih ditingkatkan agar program tersebut berjalan secara optimal dan tujuan dari program tersebut dapat tercapai.
4. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo seharusnya segera menyelesaikan *Standar Operating Procedure* (SOP) agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dalam melaksanakan Program Desa Mandiri Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Peneliti dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Matthew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Terjemahan *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. B Bandung: CV. Alfabeta.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Public*. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Regulasi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Petunjuk Teknis Desa Mandiri Pangan Tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2015 Pedoman Desa Mandiri Pangan
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2012.